

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan diperlakukan sebaik-baiknya oleh setiap orang tua, anak mempunyai hak-hak sebagai makhluk sosial lainnya yang harus diberikan tanpa mereka meminta, mereka membutuhkan perlindungan baik dari keluarga, masyarakat, dan negara. Secara umum anak dapat diartikan keturunan dari manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang masih kecil, hewan yang masih kecil, dan tumbuhan yang masih kecil. Menurut Undang-Undang anak diartikan berdasarkan batasan usia, belum menikah dan belum dewasa, Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu

ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.¹

Pada saat ini keberadaan anak di dalam lingkungan masyarakat perlu mendapat perhatian ekstra, baik dari keluarga maupun dari luar lingkungan keluarga terutama di dalam melakukan control atau pengawasan terhadap tingkah laku anak yang sedang dalam masa mencari jati dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial mendasar yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Anak yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana sangat besar dipengaruhi oleh faktor diluar anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Dalam mewujudkan kesejahteraan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap anak baik dalam hal pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya pembeda-bedaan (*discrimination*), maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perUndang-Undangan yang menjamin pelaksanaan dan menjamin hak-hak anak secara khusus.

Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak lebih tepatnya disebut dengan kenakalan anak. Kenakalan anak yang diambil dari istilah *juvenile delinquency*, yang *juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat kas pada masa muda, sifat khas pada masa remaja;

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang SPPA.

sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursusila, dan lain-lain.²

Kompleksnya permasalahan yang mengancam perkembangan anak-anak pada saat sekarang, baik itu masalah dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat mengakibatkan banyak anak yang terseret kedalam proses hukum, dengan beragam tindakan pidana yang mereka lakukan, harapan masyarakat akan keadilan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri ternyata tidak memberikan jaminan keadilan dan kebaikan bagi anak, proses hukum formal yang mereka tempuh memberikan dampak buruk terhadap fisik dan mental, menjadikan mereka sulit kembali ketengah-tengah masyarakat dan bahkan kelingkungan keluarga mereka masing-masing. Dimana keluargalah yang seharusnya tumpuan seorang anak, dengan kondisi dan stigma negatif yang mereka dapat setelah berhadapan dengan hukum seolah-olah tidak ada tempat kembali bagi anak.

Bertitik tolak dari dampak buruk proses sistem peradilan yang dilalui bagi masa depan anak timbulah keinginan masyarakat agar anak terlepas dan terhindar dari dampak tersebut ketika anak berhadapan dengan hukum, cara dimana permasalahan anak berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan tanpa menempuh jalur sistem peradilan pidana, menempuh jalur non-formal dengan melibatkan masyarakat, pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan juga pihak

² Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 25.

yang dirasakan punya kaitan, alternatif ini dikenal dengan pendekatan (*restorative justice*) yang dilaksanakan dengan cara mengalihkan (*Diversion*) proses penyelesaian dengan mengutamakan kebaikan bagi anak dan menghapus stigma negatif, anak kriminal, calon penjahat, anak asusila dan dampak lain yang mempengaruhi perkembangan anak terutama perkembangan psikologis anak.

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses sistem peradilan pidana, timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *Diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut *Diversi*.³

Pelaksanaan *Diversi* berdasarkan Undang-Undang SPPA dalam Pasal 7 Ayat (2) “*Diversi* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Prinsip utama pelaksanaan *Diversi* adalah tindakan persuasif atau dikenal juga dengan pendekatan non penal dengan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga pengambilan semua keputusan harus selalu mempertimbangkan akan kebaikan dan tumbuh kembang anak melalui pembinaan dan bimbingan ke arah yang benar, terutama menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak. Pelaksanaan dengan pendekatan persuasif

³ Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Equality, Vol. 13. No 1 februari 2008. Hlm. 96.

dalam konsep Diversi supaya di dalam melaksanakan sistem peradilan pidana hak-hak anak jadi perhatian utama, tetapi dapat dikecualikan jika upaya-upaya lain tidak dapat dilakukan atau keadaan terpaksa demi kelangsungan penyelesaian perkara.

Konsep Diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan dampak negative daripada dampak positif. Dengan alasan setelah proses hukum formal selesai akan memberikan penilaian buruk terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, anak kriminal, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.⁴

Diversi dilaksanakan mulai pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, disebutkan dalam Pasal 7 Ayat(1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi”. Hal yang paling mendasar dalam Undang-Undang SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar.⁵

Diversi perwujudan dari wewenang Aparat Penegak Hukum yang menangani kasus tindak pidana anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara dengan lebih memperhatikan kebaikan dan

⁴ *Ibid*, hlm. 97.

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

keadilan terhadap anak, wewenang ini lebih dikenal dengan istilah diskresi (*discretion*). Melalui kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian, seharusnya dapat menjadi dasar penyidik untuk melakukan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kriminal dan tidak menjadi Residivis.

Pelaksanaan diversi Pada tingkat penyidikan bertujuan agar perkara anak dapat diselesaikan secara musyawarah dan terhindar dari proses formal penyelesaian perkara tindak pidana. Musyawarah dilaksanakan dengan melibatkan pelaku, pihak korban, penyidik beserta BAPAS, dan masyarakat. Diversi pada tingkat penyidikan dilaksanakan sesegera mungkin setelah adanya bukti tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Padang setelah berlakunya Undang-Undang SPPA pada tanggal 1 Agustus 2014 sejak saat itu baru menerapkan upaya diversi. Setelah diterapkannya pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan di Polresta Padang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / 1503 / K / IX / 2014 SPKT Unit I kasus pencurian bantalan rel Kereta Api yang tersangkanya anak yang berinisial DS dan dua orang temannya. Berdasarkan Laporan Polisi : LP / 1208 / K / XI / 2015 SPKT Unit I kasus mucikari yang tersangkanya anak yang berinisial AB. Pada dua kasus ini dilaksanakanlah upaya diversi.⁶

⁶ Data dari Polresta Padang

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk diteliti yang pada prinsipnya guna untuk mengetahui **“PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG (Studi Polresta Padang)”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, diperlukan suatu pembahasan yang lebih terarah, serta mendalam, maka penulis memberikan batasan yang akan diteliti dengan perumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana anak pada tingkat penyidikan di Polresta Padang?
2. Apakah kendala yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana anak di Polresta Padang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Diversi pada tingkat penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Agar suatu penelitian menjadi terarah dan tepat sasaran, maka harus mempunyai tujuan yang pasti, adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Divesi pada tingkat penyidikan di Polresta Padang.
- b. Untuk mengetahui kendala yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana anak di Polresta Padang.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Diversi pada tingkat penyidikan

D. Manfaat Penelitian

Mamfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembang ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana.
Penulisan dan penelitian dalam proposal skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan dalam penelitian.
- b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya kedalam bentuk penulisan.
- c. Serta dapat mempraktekan ilmu yang telah penulis terima diperguruan tinggi sekaligus menjadi jawaban terhadap ketidaktahuan tentang perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat umum mengenai pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan anak. Dapat menambah perbendaharaan atas kepustakaan hukum pidana.
- b. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai konsep Diversi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan karya ilmiah selalu digunakan suatu kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai sebagai dasar dalam

penulisan dan analisis terhadap masalah yang kita hadapi, demikian pula yang bersifat teoritis ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum secara kongkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan

⁷ Dellyana.Shat. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.Hlm. 32.

⁸*Ibid.* hlm. 33.

mempertahan pergaulan perdamaian hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁹

Adapun azas-azas yang diterapkan dalam pelaksanaan diversi adalah sebagai berikut:

A. Asas Non-diskriminasi

Penjelasan Undang-Undang SPPA menyebutkan asas non-diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan mental.¹⁰

B. Asas Kepentingan Terbaik Bagi anak

Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Aspek demikian, merupakan hal yang bersifat urgen karena anak adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah generasi, bangsa dan negara. Oleh karena itu, kepentingan bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umum manusia.¹¹

b. Diversi

⁹ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada Hlm. 42.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *OP.,cit.* Hlm 54

¹¹ *Ibid*

Pelaksanaan Diversi merupakan wujud dari peran masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana yang termasuk kedalam kebijakan criminal. Jack E. Bynun dalam bukunya *Juvenile Delinquency A Sociological Approach* Mengatakan bahwa: Diversi adalah sebuah tindakan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku anak dari sistem peradilan anak¹².

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program Diversi yang dapat dilaksanakan yaitu :¹³

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan padapersetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelakudan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c) Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi

¹² Marlina. *Op.Cit*, Hlm. 97.

¹³ *Ibid*, Hlm. 98.

masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

C. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, proses, cara, dan perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan).¹⁴

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari suatu kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu bentuk program dan proyek.

2. Diversi

Menurut Undang-Undang SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luarperadilan pidana.

Diversi dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pengalihan yaitu, suatu upaya pengalihan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari dalam pengadilan ke upaya penyelesaian tindak pidana yang berada diluar pengadilan.

3. Tindak Pidana

¹⁴ Tim Reality, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Surabaya: Reality Publisher, Hlm. 402.

”Peristiwa Pidana” atau ”Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda ”strafbaar feit” yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh Seseorang (yang mampu bertanggung jawab).¹⁵

Beberapa sarjana telah berusaha untuk memberikan perumusan tentang pengertian dari peristiwa pidana, diantaranya: Moeljatno cenderung lebih suka menggunakan kata ”perbuatan pidana” dari pada kata ”tindak pidana”. Menurut beliau kata ”tindak pidana” dikenal karena banyak digunakan dalam perUndang-Undang an untuk menyebut suatu ”perbuatan pidana”. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

4. Anak

Pada umumnya, pembatasan umur anak relatif identik dengan batasan usia pertanggung jawaban pidana (*criminal liability /criminal responsibility*) seorang anak dapat diajukan kedepan persidangan peradilan pidana anak. Artinya, batas umur tersebut sebagai batas usia minimal dikategorisasikan sebagai anak, akan tetapi, hal ini bukan berarti sebagai batas usia pertanggung jawaban pidana (*criminal liability /criminal responsibility*) seorang anak untuk dapat dilakukan proses peradilan dan penahan.¹⁷

¹⁵ Moeljatno, 1998, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 56.

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 56.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, Hlm, 2

Didalam Undang-Undang SPPA pada Pasal 1 Angka (3) yang disebut anak adalah mereka yang telah mencapai 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun belum menikah.

Menanggapi batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum sangat beragam, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak yang dapat diminta pertanggung jawabannya adalah anak yang telah berusia 12 tahun, belum mencapai 18 tahun dan belum menikah, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang SPPA, walaupun masih ada beberapa Undang-Undang yang belum diseragamkan, namun batasan usia yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan amanat dari Konveksi anak. Batasan usia ini sangatlah penting diketahui oleh setiap penegak hukum dan menjadi pertimbangan apakah seorang anak dapat dimintai pertanggung jawaban atau tidak. Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia¹⁸.

5. Penyidikan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 Angka 2 KUHAP) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah

¹⁸ Nashriana, *Op.Cit.*

pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 Angka 1 KUHAP). Penyidik dalam hal ini adalah penyidik anak yang telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 26 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁹

1. Pendekatan Masalah.

Mengenai pendekatan masalah sebagaimana yang dirumuskan diatas, maka pendekatan yang digunakan adalah dengan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan Diversi pada tingkat penyidikan terhadap tindak pidana anak di Polresta Padang.

2. Sifat Penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 7.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif.²⁰ Khususnya tentang pelaksanaan Diversi pada tingkat penyidikan sesuai dengan Undang-Undang SPPA.

3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data.

a. Data Primer

Merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan yang Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana anak Pada Tingkat Penyidikan Di Polresta Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung dari data primer . Data sekunder ini berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Data sekunder ini memiliki kekuatan mengikat kedalam.²¹

2. Sumber Data

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan dua cara:²²

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

²⁰ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 42.

²¹ *Ibid*, Hlm. 113.

²² Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta Hlm. 164

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Polresta Padang.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian kepustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

Bahan-bahan hukum yang diteliti dalam penelitian pustaka adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

h. Aturan-aturan lain yang terkait dalam penulisan ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan PerUndang-Undang an berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder penulis peroleh dari literatur-literatur yang terdapat:

- a. Pustaka Pusat Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Alat/Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden. Wawancara dilakukan dengan semi-terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang

berhubungan dengan masalah yang ada kaitanya dengan penelitian yang akan penulis lakukan pada instansi terkait.

Sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi (*Purposive Sampling*).²³

Wawancara penulis lakukan pada penyidik di Polresta Padang berkisar 1 sampai 3 orang.

- b. Studi Dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

5. Pengolahan Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang terdiri dari:²⁴

Editing

Yaitu data-data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang dikelola dan dianalisis

Coding

Yaitu proses untuk mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang ditetapkan.

b. Analisis Data

²³ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 91.

²⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta Hlm 123.

Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan uraian-uraian tanpa responden, baik secara tertulis maupun lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisis secara yuridis-kualitatif yaitu mengelompokkan data-data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul berujud kata-kata, dengan bertitik pangkal pada hukum atau norma hukum yang berlaku.²⁵

Barulah setelah selesai analisis, penulis menjadikan hasil analisis tersebut dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi.

²⁵ B. Miles. Matthew dan A. Michael Huberman. 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, Hlm. 15-16.